

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan merupakan suatu proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dipahami sebagai rangkaian upaya yang dilakukan untuk memperkuat kekuatan dan kapasitas kelompok masyarakat yang lemah, termasuk individu yang berada dalam kondisi kemiskinan. Sementara itu, sebagai tujuan, pemberdayaan mengarah pada kondisi atau hasil akhir yang hendak dicapai melalui perubahan sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya rasa percaya diri, kemampuan menyampaikan gagasan atau aspirasi, kepemilikan mata pencaharian, serta partisipasi aktif dalam kehidupan sosial.¹⁴

Pendapat pemberdayaan menurut Esrom Aritonang memaknai pemberdayaan sebagai upaya untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya) yang bersumber dari potensi dan sumber daya masyarakat agar mampu membela dan mengelola kehidupannya secara mandiri. Pada dasarnya, pemberdayaan ditempatkan pada tingkat individu dan sosial sebagai landasan dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.¹⁵

¹⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Kajian Str (Bandung: PT: Refika Adiatma, 2005).

¹⁵ Esrom Aritonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 2001).

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat melalui dorongan dan motivasi, sehingga masyarakat mampu menjadi subjek yang berdaya, memiliki kapasitas dalam menentukan pilihan hidupnya, serta mampu memberikan pengaruh positif bagi kelompok atau lapisan masyarakat yang masih tertinggal.

Sementara itu, pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap berbagai kesempatan bagi perempuan, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pemberdayaan perempuan menjadi elemen strategis dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender serta mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.¹⁶

Pemberdayaan perempuan melibatkan beberapa aspek, antara lain:

- 1) Pertama, aspek pendidikan, yaitu upaya menjamin perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan yang bermutu, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi, termasuk kesempatan mengikuti pendidikan teknis dan profesional.
- 2) Kedua, aspek kesehatan, yang menekankan pemenuhan akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, meliputi kesehatan reproduksi, kesehatan ibu, serta kesehatan anak. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga mencakup peningkatan pengetahuan dan kesadaran perempuan terhadap berbagai isu kesehatan yang krusial.

¹⁶ Prijono. Onny. S, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Centre for Strategic (Jakarta: CSIS, 1996), 55.

- 3) Ketiga, aspek ekonomi, yakni peningkatan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi melalui penyediaan pelatihan keterampilan, dukungan permodalan, akses terhadap pasar, serta pendampingan dalam pengembangan usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan ekonomi ini berperan penting dalam memperkuat kemandirian finansial perempuan sekaligus mengurangi kesenjangan gender dalam pendapatan dan peluang kerja.
- 4) Keempat, aspek partisipasi politik, yang bertujuan mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui keikutsertaan dalam organisasi politik, partisipasi dalam pemilihan umum, maupun peningkatan representasi perempuan dalam jabatan politik dan pemerintahan.
- 5) Kelima, aspek hukum dan kebijakan, yaitu upaya mendorong penerapan peraturan dan kebijakan yang menjamin kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender, diskriminasi di dunia kerja, dan berbagai bentuk ketidakadilan hukum.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Ketika perempuan memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, serta peluang ekonomi, mereka mampu berperan secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Partisipasi tersebut tidak hanya memberikan dampak positif bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, pemberdayaan diarahkan untuk membentuk individu maupun komunitas yang mandiri dan memiliki daya saing dalam menjalani kehidupan, sehingga kesejahteraan keluarga dapat terwujud secara berkelanjutan.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian kelompok masyarakat yang pada kenyataannya masih belum mampu keluar dari jerat kemiskinan dan ketertinggalan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, Musa Asy'arie menyatakan bahwa lembaga atau organisasi memiliki peran penting dalam mendorong masyarakat agar berlatih dan mempersiapkan diri untuk menangkap peluang berwirausaha. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberian pelatihan sebagai bekal utama sebelum memasuki dunia usaha. Program pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelatihan Usaha: bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada mustahiq guna menumbuhkan motivasi serta semangat dalam membangun usaha secara mandiri. Kegiatan ini menjadi bentuk pembekalan agar mustahiq memperoleh pemahaman mengenai kewirausahaan, termasuk berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam menjalankan usaha.
- 2) Permodalan: merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha karena berperan sebagai input produksi yang akan menghasilkan output. Oleh karena itu, pemberian modal usaha kepada mustahiq perlu melalui pertimbangan yang matang oleh LAZNAS, guna memastikan bahwa modal tersebut dapat dikelola secara optimal. Hal ini bertujuan agar

mustahiq tidak bergantung secara terus-menerus pada dana zakat. Pemberian modal sebaiknya difokuskan pada usaha yang telah berjalan, bukan untuk pendirian usaha dari tahap awal.

- 3) Pendampingan: setelah mustahiq berhasil merintis usahanya, langkah selanjutnya adalah pendampingan oleh lembaga profesional yang memiliki keahlian di bidang terkait. Pendampingan usaha bertujuan untuk membina dan membantu mustahiq dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang. Pembinaan ini dapat dilakukan secara berkala, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan usaha mustahiq.¹⁷

B. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, sehingga perempuan mampu menggali dan mengembangkan potensi diri mereka. Dengan demikian, perempuan bisa menjadi individu yang mandiri dan berkontribusi dalam proses pembangunan.

Menurut Sumodiningrat, tujuan program pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Mendorong kemampuan perempuan dalam mengelola berbagai jenis usaha, baik skala rumah tangga, industri kecil, maupun besar, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menciptakan lapangan kerja yang mandiri dan produktif.

¹⁷ Sri Apriliyani and Zaini Abdul Malik, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 1, 2021, 89.

- 2) Membangun eksistensi, dalam hal ini eksistensi perempuan. Perempuan harus menyadari bahwa ia mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Tidak seharusnya kaum perempuan selalu berada dalam posisi yang terpuruk. Perempuan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri.
- 3) Motivasi perempuan agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidup melalui proses dialog. Perempuan juga berhak menentukan pilihan, tidak selamanya harus menurut pada laki-laki.
- 4) Mendorong perempuan untuk menyadari akan pentingnya kesetaraan dan posisi mereka di luar maupun di dalam rumah.¹⁸

C. Pendekatan Pemberdayaan

Menurut Suharto, proses pelaksanaan serta pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan melalui penerapan lima pendekatan pemberdayaan yang dikenal dengan konsep 5P, yaitu:

- 1) Pemungkinan, yakni upaya menciptakan kondisi atau iklim yang kondusif agar potensi masyarakat dapat berkembang secara maksimal. Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan membebaskan masyarakat dari berbagai hambatan kultural maupun struktural yang menghalangi pengembangan diri mereka.
- 2) Penguatan, yaitu proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan masyarakat dalam mengatasi permasalahan serta

¹⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 29.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui penguatan, pemberdayaan diharapkan mampu menumbuhkan kepercayaan diri dan kemandirian masyarakat.

- 3) Perlindungan, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya kelompok yang lemah, agar tidak mengalami penindasan dari kelompok yang lebih kuat serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.
- 4) Penyongkongan, yaitu pemberian pendampingan, bimbingan, dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran serta tanggung jawab dalam kehidupannya. Pendekatan ini bertujuan mencegah masyarakat agar tidak semakin terpuruk atau terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, yaitu menjaga dan menciptakan kondisi yang berkelanjutan agar tercipta keseimbangan distribusi kekuasaan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan melalui pemeliharaan diharapkan dapat menjamin keselarasan dan keadilan sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha.¹⁹

D. Tahap Pemberdayaan

Proses pembelajaran dalam upaya pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap dan sistematis. Menurut Tatan Hermansyah,²⁰ terdapat empat tahapan utama yang harus dilalui dalam proses pemberdayaan.

- 1) Tahap pertama adalah perencanaan, yang terbagi ke dalam dua pendekatan, yaitu top-down dan bottom-up. Perencanaan dengan

¹⁹ Afriansyah et al., *Pemberdayaan Masyarakat* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

²⁰ Tatan Hermansyah, *Memberdayakan Masyarakat*, (Bogor: Media Kalam, 2019).

pendekatan top-down dilakukan oleh lembaga pemerintah sebagai penggagas ide awal, di mana pemerintah memegang peranan dominan dalam mengatur dan mengendalikan pelaksanaan program. Sebaliknya, perencanaan dengan pendekatan bottom-up menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, mulai dari pengajuan ide dan gagasan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sementara pemerintah berperan sebagai fasilitator.

- 2) Tahap kedua adalah implementasi, yaitu pelaksanaan program yang telah dirancang sebelumnya. Pada tahap ini, masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana program, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
- 3) Tahap ketiga adalah monitoring yang dilakukan sejak awal kegiatan, khususnya pada fase pelaksanaan program. Monitoring bertujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka dapat segera dilakukan langkah perbaikan agar tujuan program tetap tercapai.

E. Indikator Pemberdayaan

- 1) Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di dalam lingkungan.
- 2) Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.

- 3) Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
- 4) Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara sama dan setara.²¹

F. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat ialah:

- 1) Berkurangnya masyarakat miskin
 - 2) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
 - 3) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai upaya peningkatan kesejahteraan penduduk miskin. Tingginya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi menunjukkan bahwa program tersebut dirasakan manfaatnya serta memberikan dampak positif, baik bagi lingkungan sekitar maupun bagi kelompok sasaran yang diberdayakan.
 - 4) Selanjutnya, meningkatnya tingkat kemandirian kelompok penerima manfaat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemberdayaan.
- Tujuan utama dari program pemberdayaan ekonomi adalah membangun kemampuan kelompok ekonomi lemah agar mampu berdiri secara

²¹Riant Nugroho, '*Gender Dan Strategi Pengaruh-Utamanya Di Indonesia*', (Yogyakarta:Pustaka), 2008.

mandiri. Kemandirian tersebut tercermin dari kemampuan kelompok dalam menciptakan sumber pendapatan secara berkelanjutan, salah satunya melalui pengelolaan unit usaha sendiri.

- 5) Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerataan pendapatan juga menjadi capaian penting, yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok maupun kebutuhan sosial dasarnya.²²

²² *Ibid.*